

**RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAAN TEPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2025**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025.

Renja Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 tidak terlepas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dengan perencanaan program kerja Tahunan Kabupaten Deli Serdang dalam satu pola sikap dan tindak.



Kepada semua pihak yang telah mengarahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Dengan segala keterbatasan yang ada, semoga Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya berimplikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, semoga rencana kerja DPMPTSP Tahun 2025 ini dapat mendorong terwujudnya percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.

Di tetapkan di : Lubuk Pakam
Tanggal : 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

MUHAMMAD SALIM, S.P., M.Si
NIP. 19710616 199803 1 009



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Lampiran Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun Lalu	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang	26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang	30
2.4 Review terhadap rancangan RKPD	31
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional.....	40
3.2 Tujuan dan Sasara Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG	
4.1 Program dan Kegiatan	47
BAB V. PENUTUP	54



**Lampiran
Tabel :**

2.1	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	10
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	12
2.3	Analisis pencapaian indikator kinerja utama DPMPTSP Tahun 2023	28
2.4	Pencapaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023	29
2.5	Review terhadap rancangan awal RKPD 2025	30
3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kinerja	41
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	49



B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja (Renja) berpedoman Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang sebagai Perangkat Daerah telah menyusun Renja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dengan mempedomani Renstra tahun 2025-2026.

Selanjutnya Renja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun 2025.



1.2 Landasan Hukum

Landasan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);



13. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invesntarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
15. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dimaksudkan adalah sebagai acuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mengoperasionalisasikan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Tujuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 sebagai Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2025;
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2025;
3. Indikator kinerja DPMPTSP Tahun 2025;
4. Kelompok sasaran DPMPTSP Tahun 2025;
5. Pagu indikatif program dan kegiatan DPMPTSP Tahun Anggaran 2025.

Adapun Tujuan dari Rencana Kerja DPMPTSP adalah :

1. Sebagai landasan operasional penyusunan program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Deli Serdang serta berdasarkan penyesuaian hasil evaluasi Tahapan APBD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Investarisasi

- Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan tidak mengubah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berlaku.;
2. Menyusun rencana strategi pencapaian indikator kinerja pembangunan DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah;
 3. Mengevaluasi Renja DPMPTSP Tahun sebelumnya;
 4. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP tahun sebelumnya;
 5. Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Tahun 2025;
 6. Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang sebagai instrument akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja Tahun 2025;
 7. Menjadi pedoman dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025; dan
 8. Menjadi alat observasi untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika Penyusunan Dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini berisikan Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,

dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Pada bagian ini berisikan Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini berisikan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini berisikan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP

Pada bagian ini berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMPTSP berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DPMPTSP berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang

Pada bagian ini berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian tujuan kepala daerah dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada bagian ini berisikan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang

Pada bagian ini berisikan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPMPTSP.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

Pada bagian ini berisikan tabel perubahan rencana program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

B A B II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian RenstraDPMPTSP Kabupaten Deli Serdang

Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati Deli Serdang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappelitbang dan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Memasuki Tahun Pertama pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra, serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah.

Tujuan Renja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 202 yaitu "Meningkatkan investasi dan Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel". Tujuan tersebut dijabarkan kembali ke dalam tiga sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai Investasi PMDN dan PMA;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah.



Pencapaian kinerja dan anggaran Tahun 2023 dalam mencapai sasaran secara lebih lengkap disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya nilai Investasi PMDN dan PMA	Persentase Realisasi Investasi	90	102,17	113,52	Sangat Tinggi	Laporan Realisasi Investasi Daerah dari BKPM RI
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	87,12	106,24	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPTSP Kab. Deli Serdang.
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	79	78,42	99,27	Tinggi	Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

Dengan melihat 3 (tiga) indikator untuk mengukur 3 (dua) sasaran strategis, indikator kinerja tersebut mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang dalam Persentase realisasi investasi dengan target 90% tercapai 102,17% dan indikator tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah yang melampaui target yaitu dengan indeks sebesar 87,12 dari target yang telah ditetapkan sebesar 82 dengan capaian kinerja 106,24% (sangat tinggi), dan untuk indikator nilai LHE AKIP Perangkat Daerah realisasi sebesar 78,42 dari target 79 dengan capaian kinerja 99,27 (tinggi).

Hal tersebut menunjukan bahwa indikator sasaran DPMPTSP Kabupaten Deli

Serdang sudah mendukung tujuan DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang.

Pencapaian tersebut didorong oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan dan penganggaran yang sesuai;
2. Adanya komitmen dari SKPD teknis dalam bekerjasama terkait proses penerbitan perizinan yaitu dengan adanya petugas dari masing-masing SKPD teknis yang berkantor di DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang;
4. Selain menggunakan APBD, adanya dukungan dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
5. Tersosialisasinya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan yang sudah mulai ada perubahan dengan dilakukannya sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang diantaranya adalah :
 - a. Sosialisasi perizinan melalui media sosial (Instagram, Facebook & Tiktok);
 - b. Sosialisasi Perizinan melalui *Web-site* Kab. Deli Serdang;
 - c. Sosialisasi melalui media massa.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 disajikan secara lengkap pada Tabel 2.3



Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra DPMPTSP
Kabupaten Deli Serdang s/d Tahun 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	4		5		6		7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.18.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	%			76	8.265.591.934	100	9.621.646.735	100	9.371.028.321	-	8.417.641.808	76,00	16.663.233.742
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%			97,62	96.603.700	100	91.262.700	100	91.262.700	97,42	88.910.700	195,05	185.514.400
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			2	27.433.000	2	25.907.000	2	25.907.000	2,00	25.235.000,00	4,00	52.668.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD SKPD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sebelum Perubahan APBD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3											
2.18.0 1.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			1	13.793.020	1	13.030.020	1,00	12.694.020,00	2,00	26.487.040
2.18.0 1.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen			1	13.736.480	1	12.973.480	1	12.637.480	2,00	26.373.960
2.18.0 1.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DFA- SKPD	Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA- SKPD	Dokumen			1	13.751.900	1	12.988.900	1,00	12.652.900,00	2,00	26.404.800



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD SKPD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sebelum Perubahan APBD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sesudah Perubahan APBD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		3													
2.18.0 1.2.01. 05	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			1	13.751.900	1	12.988.900	1	12.988.900	1,00	12.652.900,00	2,00	26.404.800
2.18.0 1.2.01. 06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Laporan			1	14.137.400	1	13.374.400	1	13.374.400	1	13.038.400	2,00	27.175.800
2.18.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlibat Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%			83,89	6.531.406.857	100	7.910.943.312	100	7.674.117.940	88,07	6.870.915.158	171,96	13.402.322.015



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	4		5		6		7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		3													
2.18.0 1.2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan			756	6.140.868.677	43	7.499.697.842	43	7.226.302.470	43,00	6.452.314.013	799,00	12.593.202.690
2.18.0 1.2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			192	377.799.280	10	398.316.720	10	434.886.720	10,00	406.008.395	202,00	783.807.675
2.18.0 1.2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			1	12.718.900	1	12.928.750	1	12.928.750	1,00	12.592.750	2,00	25.311.650
2.18.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Penerimaan Layanan Umum Kedinasan	%			94,30	407.808.666	100	412.876.567	100	453.296.211	86,87	377.839.269	181,17	785.647.935



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD SKPD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sebelum Perubahan APBD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sesudah Perubahan APBD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		3													
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			8	9.582.456	8	6.083.950	8	6.083.950	8,00	6.083.950	16,00	15.676.406
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			72	75.117.671	77	92.186.512	4	74.939.756	4,00	74.939.756	76,00	150.057.427
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			8	50.690.690	9	43.322.555	9	47.490.955	9,00	47.490.955	17,00	98.181.645
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen			390	3.600.000	2	6.924.094	2	6.924.094	1,00	3.600.000	391,00	7.200.000
2.18.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan			9	27.353.171	12	27.378.456	12	27.378.456	12,00	27.134.110	21,00	54.487.281



RENCANA KERJA (RENKA) TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD SKPD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi/Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sebelum Perubahan APBD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sesudah Perubahan APBD)		Realisasi/Capaian Kinerja dan Anggaran Renta RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renta RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		3													
2.18.0 1.2.06 06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			485	241.454.678	436	236.981.000	436	290.479.000	350,00	218.590.498	835,00	480.045.176
2.18.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%			100,0 0	6.662.400	-	-	100,0 0	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00	200,00	18.662.400
2.18.0 1.2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	Jenis			1	6.662.400	-	-	2,00	12.000.000,00	2,00	12.000.000,00	3,00	18.662.400
2.18.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	%			93,82	907.615.678	100	988.794.156	100	918.781.470	89,27	866.647.085	183,09	1.774.262.763
2.18.0 1.2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			36	360.000	36	360.000	36	360.000	36,00	360.000,00	72,00	720.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD SKPD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sebelum Perubahan APBD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sesudah Perubahan APBD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja RPJMD s.d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		3													
2.18.0 1.2.03. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			5	285.939.632	5	342.955.200	5	342.955.200	5,00	291.120.863	10,00	577.060.295
2.18.0 1.2.03. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			6	621.316.046	6	645.478.956	6	575.466.270	6,00	575.166.422	12,00	1.196.482.468
2.18.0 1.2.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	%			95,86	315.494.633	100	217.770.000	100	221.570.000	91,88	201.329.596	187,74	516.824.229



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD SKPD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sebelum Perubahan APBD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sesudah Perubahan APBD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja RPJMD s.d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		3													
2.18.0 1.2.03 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			7	205.460.633	6	217.770.000	7	221.570.000	7,00	201.329.596	14,00	407.790.229
2.18.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Kebijakan Iklim Penanaman Modal	%			100	12.210.000	-	-	100,0 0	149.999.850,00	-	21.033.636,00	100,00	
2.18.0 2.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	%			10,34	12.210.000	-	-	100,0 0	149.999.850,00	14,02	21.033.636,00		
2.18.0 2.2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten/kota	Dokumen			-	2.960.000	-	-	1,00	149.999.850,00	-	21.033.636		



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	4		5		6		7		8		9	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1		3													
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	%						27.747.303	100	157.673.900				
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	%			56,09	27.747.303	100	157.673.900	100	237.523.800	53,37	114.138.262,00	109,47	141.885.565
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Dokumen					2	157.673.900	4	237.523.800	7,00	114.138.262	7,00	114.138.262
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal	%			81	898.452.593	100	1.145.003.228	100	1.129.258.748,00	-	997.353.588,00	81,00	1.895.806.181



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sebelum Perubahan APBD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Setelah Perubahan APBD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja RPJMD era Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.		3													
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu dibidang Penanaman Modal	%			94,27	898.452.593	100	1.145.003.228	100	1.129.258.748	87,36	997.353.588	181,63	1.895.806.181
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usaha			5.979	838.705.813	3000	1.065.109.148	5000	1.049.529.148	5.308,00	941.843.988	11.287,00	1.780.549.801



RENCANA KERJA (RENKA) TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemertintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RP-JMD SKPD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RP-JMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sebelum Perubahan APBD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sesudah Perubahan APBD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra RP-JMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3													
2.18.0 4.2.01. 02	Pemantauan Pemerintahan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemerintahan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan Usaha			40	31.476.780	40	15.829.600	4	7.400.000	4,00	7.030.000,00	44,00	38.506.780
2.18.0 4.2.01. 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang			100	28.270.000	300	64.064.480	300	72.329.600	331,00	48.479.600,00	431,00	76.749.600



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	4		5		6		7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		3													
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penanaman Modal Yang Memenuhi Ketentuan	%			1650	251.335.472	100	313.000.000	100	313.000.000,00	-	260.809.500,00	1.650,00	512.144.972
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%			63,89	251.335.472	100	313.000.000	100	313.000.000	83,33	260.809.500	147,21	512.144.972
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha			8	199.931.472	350	270.382.000	350	287.362.000	150,00	255.069.500	158,00	456.000.972



RENCANA KERJA (RENGA) TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target (RPJMD SKPD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD))		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sebelum Perubahan APBD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sesudah Perubahan APBD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renta RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana RPJMD sid Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3													
2.18.0 5.2.01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha			6	51.404.000	40	42.618.000	40	25.638.000	11,00	4.740.000,00	17,00	56.144.000
2.18.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan	%			3	286.179.824	100	257.504.500	100	257.530.200	-	254.190.200	3,00	540.370.024
2.18.0 6.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%			91,54	286.179.824	100	257.504.500	100	257.530.200	98,71	254.190.200	190,25	540.370.024



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RP-JMD SKPD Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RP-JMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD sampai Gonggan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sebelum perubahan APBD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (Sesudah Perubahan APBD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Ranja RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Ranja RP-JMD s.d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		3													
2.18.0 6.2.01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dilolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokume n			1	286.179.824	5	257.504.500	5	257.530.200	4,00	254.190.200	5,00	540.370.024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi Sekretariat, membawahkan sub bagian Umum, Perencana Ahli Muda, Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan Layanan.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja peningkatan investasi dan pelayanan perizinan sesuai misi dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.



Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang. Indikator yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran pertama yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu *entry point* utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Adapun capaian indikator Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Cttn Penting
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(14)
1	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	US\$ (ribu)	-	-	104.529,62	104.529,62	104.529,62	110.895,47	120.071,0	
		Rupiah (juta)	-	-	2.772.893,58	2.772.893,58	2.772.893,58	2.884.918,48	2.636.565,0	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	-	-	82	82	83	85	87,12	
3	LHE AKIP	Poin	-	-	79	82	80,01	80,02	78,42	

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Penyederhanaan prosedur perizinan melalui pengadaan peralatan pendukung pengurusan izin usaha.
2. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam pengurusan izin usaha
3. Pembentukan unit-unit khusus di setiap kecamatan dimana agar setiap permasalahan pengurusan izin dapat disampaikan oleh masyarakat untuk selanjutnya ditindaklanjuti di Dinas.

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya dana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
2. Masih banyaknya masyarakat yang enggan mengurus izin usaha sendiri, dimana masyarakat lebih memilih menggunakan agen/calor dalam pengurusan izin usahanya.



Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Perlunya upaya-upaya lainnya untuk penyederhaan prosedur perizinan guna percepatan berusaha seperti revisi standar operasional prosedur pelayanan perizinan/non perizinan dan revisi standar pelayanan perizinan dan non perizinan
2. Perlu penambahan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana pelayanan yang menyamankan para pelaku usaha dan masyarakat
3. Perlunya koordinasi dan kerjasama yang intens antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan teknis terkait agar percepatan penerbitan izin dapat diwujudkan

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cttn Penting
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	US\$ (ribu)	-	-	104..529,62	104..529,62	104..529,62	110.895,47	120..071,0		184,996,8	184,996,8	
		Rupiah (juta)	-	-	2.772.893,58	2.772.893,58	2.772.893,58	2.884.918,48	2.636.565,0		2.772.893,58	2.772.893,58	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kualitas pelayanan	poin	-	-	82	82	83	85	87,12		87	87	
3	LHE AKIP	Poin	-	-	79	82	80,01	80,02	78,42		80,01	80,02	



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan. Pemberian tugas ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu utama yang berkembang dalam pembangunan investasi di Kabupaten Deli Serdang pada umumnya sama dan dipengaruhi oleh isu-isu strategis nasional. Isu-isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan sistem perizinan satu pintu;
2. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam pengelolaan promosi investasi;
3. Masih belum adanya penyederhanaan berbagai peraturan terkait investasi baik di pusat maupun di daerah;
4. Masih rendahnya realisasi investasi PMDN dan PMA;
5. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dalam pengembangan investasi;
6. Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai;
7. Belum optimalnya kerjasama kemitraan investasi daerah;
8. Masih terbatasnya media promosi dalam negeri dan luar negeri dalam daya tarik investasi.



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6. di bawah ini :



Tabel. 2.5.
Review Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Kategori	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025			Indikator Kinerja			Tahun 2023			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	
					Progra m	Keluaran Sub kegiatan				Progra m	Keluaran Sub kegiatan		
urusan/ Bidang/ Ususan/ Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													16.982.118.077
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													10.592.600.972
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													103.795.960
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	74 Poin	2 Dokumen	100%	Nilai LHE AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	74 Poin	2 Dokumen	100%	29.466.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai LHE AKIP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	74 Poin	1 Dokumen	100%	Nilai LHE AKIP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	74 Poin	1 Dokumen	100%	14.592.480



Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai LHE AKIP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	74 Poin	1 Dokumen	100%	14.592.480	Nilai LHE AKIP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	74 Poin	1 Dokumen	100%	14.592.480
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai LHE AKIP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	74 Poin	1 Dokumen	100%	14.607.900	Nilai LHE AKIP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	74 Poin	1 Dokumen	100%	14.607.900
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai LHE AKIP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	74 Poin	1 Dokumen	100%	14.607.900	Nilai LHE AKIP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	74 Poin	1 Dokumen	100%	14.607.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LHE AKIP	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	74 Poin	1 Dokumen	100%	15.928.400	Nilai LHE AKIP	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	74 Poin	1 Dokumen	100%	15.928.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8.176.943.825						8.176.943.825
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	79 Poin	1 Tahun	100%	7.779.923.462	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	79 Poin	1 Tahun	100%	7.779.923.462
Penyediaan	Indeks	Jumlah	Persentase	79	1 Tahun	100%	383.117.700	Indeks	Jumlah	Persentase	79 Poin	1 Tahun	100%	383.117.700



Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kepuasan Masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Deli Serdang & Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Poin	1 Dokumen	100%	13.902.663	Kepuasan Masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Poin	1 Dokumen	100%	13.902.663
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Deli Serdang & Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Poin	1 Dokumen	100%	13.902.663	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Poin	1 Dokumen	100%	13.902.663
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		79 Poin	168 Stel	100%	89.376.000	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		79 Poin	168 Stel	100%	89.376.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Komponen Alat-Alat Listrik dan Elektronik	Persentase administrasi umum perangkat daerah		79 Poin	8 Jenis	100%	9.589.372	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Komponen Alat-Alat Listrik dan Elektronik	Persentase administrasi umum perangkat daerah		79 Poin	8 Jenis	100%	9.589.372
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah		79 Poin	10 Jenis	100%	345.479.080	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah		79 Poin	10 Jenis	100%	345.479.080
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah		79 Poin	72 Jenis	100%	76.388.460	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah		79 Poin	72 Jenis	100%	76.388.460



Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	79 Poin	8 Jenis	100%	42.064.450	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	79 Poin	8 Jenis	100%	42.064.450
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	79 Poin	1061 Eksemplar	100%	6.924.094	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	79 Poin	1061 Eksemplar	100%	6.924.094
Facilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase administrasi umum perangkat daerah	79 Poin	10 Orang/Kali	100%	46.987.618	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase administrasi umum perangkat daerah	79 Poin	10 Orang/Kali	100%	46.987.618
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase administrasi umum perangkat daerah	79 Poin	322 OH	100%	287.512.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase administrasi umum perangkat daerah	79 Poin	322 OH	100%	287.512.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														97.638.771
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	79 Poin	6 Jenis	100%	97.638.771	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	79 Poin	6 Jenis	100%	97.638.771
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														1.030.905.342
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Materai yang Tersedia	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	79 Poin	36 Buah	100%	360.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Materai yang Tersedia	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	79 Poin	36 Buah	100%	360.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah jasa Telepon/Internet dan Air	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	79 Poin	5 Jenis	100%	409.555.200	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah jasa Telepon/Internet dan Air	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	79 Poin	5 Jenis	100%	409.555.200



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	79 Poin	6 Jenis	100%	620.990.142	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	79 Poin	6 Jenis	100%	620.990.142
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	79 Poin	8 Unit	100%	128.942.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	79 Poin	8 Unit	100%	128.942.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	79 Poin	1 paket	100%	150.054.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	79 Poin	1 paket	100%	150.054.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														
Kabupaten/Kota														
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah														
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah Bidang Penanaman Modal	Persentase penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah dibidang penanaman modal	41658 17,19 Rp Juta	1 Dokumen	100%	63.907.679	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah Bidang Penanaman Modal	Persentase penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah dibidang penanaman modal	41658 17,19 Rp Juta	1 Dokumen	100%	63.907.679
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal	Persentase penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah dibidang penanaman modal	41658 17,19 Rp Juta	2 kali	100%	27.646.504	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal	Persentase penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah dibidang penanaman modal	41658 17,19 Rp Juta	2 kali	100%	27.646.504



Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota												227.441.503	227.441.503	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah RUPM yang Disusun	Persentase pembuatan peta potensi investasi kabupaten	41658 17,19 Rp Juta	1 Dokumen	100%	109.561.507	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah RUPM yang Disusun	Persentase pembuatan peta potensi investasi kabupaten	416581 7,19 Rp Juta	1 Dokumen	100%	109.561.507
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah Data Peluang Investasi	Persentase pembuatan peta potensi investasi kabupaten	41658 17,19 Rp Juta	1 Dokumen	100%	117.879.996	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah Data Peluang Investasi	Persentase pembuatan peta potensi investasi kabupaten	416581 7,19 Rp Juta	1 Dokumen	100%	117.879.996
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL												510.645.932	510.645.932	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												510.645.932	510.645.932	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah rencana penyusunan strategi promosi penanaman modal	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	41658 17,19 Rp Juta	3 Jenis	100%	181.957.632	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah rencana penyusunan strategi promosi penanaman modal	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	416581 7,19 Rp Juta	3 Jenis	100%	181.957.632
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah pameran promosi investasi penanaman modal	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	41658 17,19 Rp Juta	2 kali	100%	328.688.300	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah pameran promosi investasi penanaman modal	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	416581 7,19 Rp Juta	2 kali	100%	328.688.300
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												1.259.789.534	1.259.789.534	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota												1.259.789.534	1.259.789.534	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah Izin yang Terbit sesuai SOP	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dibanding penanaman	41658 17,19 Rp Juta	3500 Izin	100%	1.064.480.202	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah Izin yang Terbit sesuai SOP	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dibanding penanaman	416581 7,19 Rp Juta	3500 Izin	100%	1.064.480.202



Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah dokumen laporan IKM terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dibanding penanaman modal	modal	Jumlah dokumen laporan IKM terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	100%	40 dokumen	35.244.936	416581 17,19 Rp Juta	100%	40 dokumen	416581 7,19 Rp Juta	100%	35.244.936
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah dokumen laporan IKM terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dibanding penanaman modal	modal	Jumlah dokumen laporan IKM terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	100%	40 dokumen	35.244.936	416581 17,19 Rp Juta	100%	40 dokumen	416581 7,19 Rp Juta	100%	35.244.936
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengacaraan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Persentase pelayanan konsultasi dan penanganan pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dibanding penanaman modal	modal	Persentase pelayanan konsultasi dan penanganan pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	100%	100%	160.064.396	416581 17,19 Rp Juta	100%	100%	416581 7,19 Rp Juta	100%	160.064.396
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL															
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Pemantauan LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	modal	Pemantauan LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	100%	6 Kali	327.612.416	416581 17,19 Rp Juta	100%	6 Kali	416581 7,19 Rp Juta	100%	327.612.416
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah pelaksanaan bintek untuk sistem perizinan OSS maupun LKPM Online	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	modal	Jumlah pelaksanaan bintek untuk sistem perizinan OSS maupun LKPM Online	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	100%	7 kali	166.133.965	416581 17,19 Rp Juta	100%	7 kali	416581 7,19 Rp Juta	100%	166.133.965
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah Pemantauan berupa Berita Acara Pengawasan (BAP) dan Profil Pengawasan	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	modal	Jumlah Pemantauan berupa Berita Acara Pengawasan (BAP) dan Profil Pengawasan	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	100%	12 Kali	104.188.416	416581 17,19 Rp Juta	100%	12 Kali	416581 7,19 Rp Juta	100%	104.188.416
597.934.797															
597.934.797															

39

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan

merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan pada masing-masing arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal;

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal.

2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2025-2026 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 ini mengacu pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, yang memuat tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang memiliki 3 (dua) tujuan yaitu:

- a. Tujuan rencana kerja dari penjabaran misi Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah:
 1. Meningkatkan Investasi;
 2. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 3. Meningkatkan pelayanan prima pemerintah daerah.

Adapun sasaran yang ingin dicapai DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mendukung Tujuan 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

- b. Sasaran
 1. Meningkatnya Realisasi Investasi;
 2. Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
 3. Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Investasi		Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	4.375.389,83	4.444.918,48
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	5,00	6,00
2	Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai LHE AKIP	80,01	80,02
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	80,01	80,02
3	Meningkatkan pelayanan prima pemerintah daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	83	85
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	85

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pencapaian arah kebijakan Nasional Tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi pada proses pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025.

Dalam rencana penyusunan program dan kegiatan, DPMPTSP memiliki 6 (enam) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp16.982.118.077,- (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Seratus Delapan Belas Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

1. Program Penunjang adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam penataan administrasi dan penunjang operasional kantor.

1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

dengan sub kegiatan adalah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RKA SKPD;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan Perubahan RKA SKPD;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan DPA SKPD;
5. Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan Perubahan DPA



SKPD;

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2) Administrasi keuangan Perangkat Daerah

dengan sub kegiatan adalah :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

dengan sub kegiatan adalah :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
7. fasilitasi Kunjungan Tamu;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan;
2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah

dengan sub kegiatan adalah :



1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor;

**6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah**

dengan sub kegiatan adalah :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinadan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya;

2. Program Prioritas

1. Program Pelayanan Penanaman Modal :

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan, serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang Pembangunan dan Jasa Usaha. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja pelayanan sehingga tercapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik.

**1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu
Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.**

Sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal.

2) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinanyang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan nama sub kegiatan yaitu :

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya memberikan iklim investasi yang kondusif, bertujuan menambah daya tarik investor dalam berinvestasi sertasosialisasi potensi investasi, meningkatkan kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi. Tujuannya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu SatuPintu kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait provinsi dan Pusat.

1) Pembuatan peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Rencana Umum penanaman Modal;
2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal :

Program ini merupakan untuk memberikan arah pengembangan investasi pada tahun berikutnya dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas promosi dan kualitas pelayanan dalam bidang penanaman modal, meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi.

1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

dengan nama sub kegiatan yaitu :



1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Kewenangan Provinsi;

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:

Program ini merupakan upaya dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan salah satunya dengan melakukan evaluasi. Tujuannya sebagai wadah bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pengawasan serta pengendalian dan memberikan kepastian hukum dalam melakukan investasi di Kabupaten Deli Serdang.

**1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

dengan nama sub kegiatan yaitu :

1. Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
3. Pengawasan Penanaman Modal.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Deli Serdang dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Rencana program baik program prioritas, program penunjang beserta indikator keluaran program sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPD.

Pemilihan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program terutama program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Program-program Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam tabel rumusan rencana program dan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kabupaten Deli Serdang. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (3)	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n (4)	Tahun n+1 (5)	Tahun n (6)	Tahun n+1 (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					16.214.885.112
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100%	100%	11.241.447.999	11.601.259.517
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100%	100%	100.458.000	103.903.485
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	28.105.000	29.510.250
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.349.200	14.835.471
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.264.000	14.776.104
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.087.900	14.792.295



	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.087.900	14.792.295
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.564.000	15.197.070
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	8.813.763.812	8.492.678.849
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	8.386.775.332	8.023.314.632
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	393.720.000	436.700.922
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.268.480	32.663.295
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasaan	100%	100%	100%	753.959.027	1.443.870.464
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	7.371.150	6.388.148
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	249.297.240	514.306.653
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	18.386.000	20.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	79.960.313	96.795.038
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	69.951.074	73.317.319
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.974.980	6.946.479
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.961.270	28.747.379



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	350 Laporan	717.369.450
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Gedung Kantor	100%	100%	149.662.355
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	550.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	73.249.100	149.662.355
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	100%	1.189.138.060	1.126.415.864
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	500.000	360.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	495.627.600	448.302.960
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	693.010.460	677.752.904
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	310.880.000	284.728.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	221.570.000	228.658.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	89.310.000	56.070.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	96.000.000	96.000.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Kebijakan Iklim Penanaman Modal	100%	156.999.995	182.400.876
2.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	100%	156.999.995	182.400.876
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	156.999.995	182.400.876



3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100%	100%	624.999.845	673.223.250
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100%	100%	624.999.845	673.223.250
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	624.999.845	529.678.800
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	111.953.500	143.544.450
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	4.298.670.623	3.137.067.146
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal	100%	100%	4.298.670.623	3.137.067.146
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	4.234.709.831	91.211.200.000
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	3200 Pelaku Usaha	3200 Pelaku Usaha	63.960.792	197.013.923
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penanam Modal Yang Mematuhi Ketentuan	100%	100%	385.844.000	328.650.000
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	385.844.000	328.650.000
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	32.120.000	82.000.000



	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha	303.404.000	350.000.000
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Di analisa dan Di verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	82.440.000	170.000.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	274.155.615	292.284.324
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	100%	274.155.615	292.284.324
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen	274.155.615	292.284.324

B A B V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang untuk Tahun 2025 ini maka dapat diketahui secara jelas apa yang menjadi rencana kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2025 setelah adanya anggaran kegiatan. Karena Renja DPMPTSP merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk melihat kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya.

Renja DPMPTSP sangat terkait dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan dengan mengacu kepada Peraturan Mendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratiran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dinas pada tahun mendatang dan Renstra DPMPTSP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Deli Serdang.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi Rencana Kerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renja dan



untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renja yang dibuat.

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholder* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlu komunikasi dan sosialisasi Renja ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan sesuai dengan Renja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian hasil pencapaian sasaran dan target secara rutin untuk mengetahui kinerja dari seluruh aparat. Kegiatan evaluasi ini juga bertujuan mensinkronisasikan berbagai kegiatan untuk menilai tolak ukur antara perencanaan dan pelaksanaan. Hasil dari evaluasi ini bisa berupa penyesuaian terhadap Renja untuk pencapaian Visi dan Misi Organisasi;
5. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrase, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Semoga Rencana Kerja ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir yaitu Peningkatan Nilai Investasi dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Program dan Kegiatan DPMPTSP serta menjadikan Kabupaten Deli Serdang menjadi tujuan investasi dengan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan.

Di tetapkan di : Lubuk Pakam
Tanggal : 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM, S.P., M.Si
NIP. 19710616 199803 1 009